

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor Pembangunan perkotaan di Indonesia telah meningkat pesat yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin besar dalam menciptakan peluang bagi masyarakat pedesaan untuk bermigrasi ke kawasan urban. Namun, di balik kemajuan ekonomi tersebut, urbanisasi juga membawa sejumlah tantangan serius yang harus diatasi. Salah satu dampak yang paling terasa dari urbanisasi adalah meningkatnya kemacetan lalu lintas di kota-kota besar. Mobilitas penduduk yang tinggi dan infrastruktur transportasi yang terbatas menyebabkan kemacetan menjadi masalah yang kronis. Selain itu, pertumbuhan pesat kawasan perkotaan juga berkontribusi pada peningkatan polusi udara dan pencemaran lingkungan terutama di Ibu Kota Jakarta.

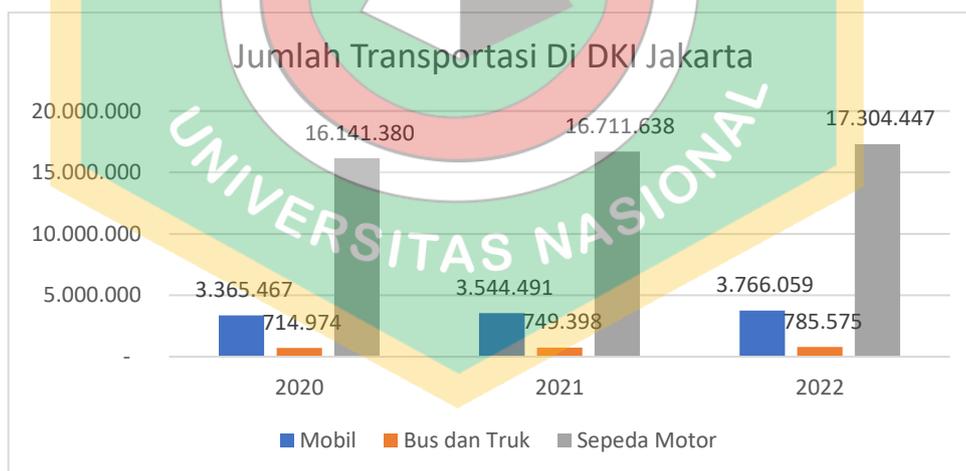
Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan budaya merupakan aspek-aspek yang terlibat dalam berbagai aktivitas baik di Masyarakat perkotaan maupun daerah pedalaman. Oleh karena itu, ditemukan bahwa terdapat suatu sistem kawasan perkotaan, yang mencakup organisasi dan fungsi kotamadya suatu negara, yang berpengaruh keadaan kondisi lingkungan. Tekanan kota akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Perkembangan kota akan melakukan pengelolaan dengan berbagai masalah dan juga membutuhkan desain perkotaan yang menyeluruh agar lebih maksimal dalam memperbaikinya.

Semua sarana prasarana pemerintah akan bergantung pada Ibu Kota masing-masing. Kota memiliki fungsi utama sebagai pusat segala aktivitas pemerintahan, termasuk menjadi pusat kekuasaan politik dan ekonomi suatu negara. Selain itu, ibu kota mencerminkan aspek kebudayaan dari negara tersebut, yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda dan unik dari negara terkait. Kota dibangun sebagai bukti diri berdasarkan suatu negara untuk membantu negara terkait menjadi makmur.

Negara dianggap maju dan berkembang jika pengelolaan dan pembangunannya sempurna dan tidak berdampak negatif pada siapa pun. Pengelolaan ibukota adalah tugas yang sulit karena membutuhkan pertimbangan yang matang untuk menghindari perselisihan. Pemerintah negara harus mempertimbangkan semua efek yang tidak akan membahayakan negara lain saat pemindahan ibu kota. Jakarta merupakan ibukota metropolitan berpenduduk dengan jumlah penduduk telah mencapai 278.692,2 Jiwa. Hal ini dapat menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Jakarta semakin meningkat dan berimplikasi pada permasalahan yang semakin kompleks.

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, terdapat tren yang meningkat terkait volume kendaraan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam tiga tahun terakhir, DKI Jakarta mengalami lonjakan yang signifikan dalam volume kendaraan yang melintasi jalanan ibu kota. Data menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun untuk semua jenis kendaraan, mulai dari mobil, bus, truk, hingga sepeda motor.

Tabel 1. 1
Jumlah Transportasi Di Jakarta



Pada tahun 2020, jumlah mobil yang melintasi Jakarta mencapai 3,365,467, yang kemudian meningkat menjadi 3,766,059 pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah bus dan truk juga mengalami kenaikan yang tinggi dari 714,974 pada tahun 2020 menjadi 785,575 pada tahun 2022. Namun, peningkatan paling dramatis terjadi pada sepeda motor, yang melonjak dari 16,141,380 pada tahun 2020 menjadi

17,304,447 pada tahun 2022. Peningkatan volume kendaraan yang drastis ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kemacetan lalu lintas di seluruh wilayah Jakarta. Dengan jalanan yang semakin padat oleh jumlah kendaraan yang terus bertambah, pergerakan kendaraan menjadi lebih lambat dan efisiensi transportasi menjadi terganggu, berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

Dari data tersebut tampaknya masalah kemacetan telah menjadi semakin nyata dan meresahkan dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan signifikan dalam volume kendaraan, termasuk mobil, bus, truk, dan sepeda motor, mengindikasikan bahwa jalanan Jakarta semakin padat. Sehingga dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka pemerintah DKI Jakarta merespons dengan mengeluarkan sebuah solusi berupa sistem ganjil genap, rekayasa lalu lintas dan memperluas sistem transportasi terintegrasi. Kemacetan terjadi karena adanya peningkatan urbanisasi yang dimana mayoritas penduduk Jakarta adalah masyarakat luar kota. Yang ingin mencari pekerjaan dan tempat tinggal untuk sementara atau menetap. Hal itulah yang menimbulkan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Mu'allimah & Mashpufah, 2022).

Tindakan ini memiliki peran penting dalam mendukung akses stabilitas, mobilitas penduduk dalam ruang kota, dan mendorong perekonomian di setiap wilayah. Dengan tujuan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan daerah secara efektif dan optimal dengan mewujudkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dan merevitalisasi seluruh aspek sarana dan prasarana. Pemerintah kota memiliki peran penting dalam merancang dan menerapkan kebijakan transportasi umum yang harus dipertimbangkan kembali dengan berbagai aspek, seperti aspek teknis, sosiologis, dan politis, yang membahas dalam pengadaan lahan, penataan ruang, dan modal (Sitorus, 2022).

Semua sarana prasarana pemerintah akan bergantung pada Ibu Kota masing-masing. Kota memiliki fungsi utama sebagai pusat segala aktivitas pemerintahan, termasuk menjadi pusat kekuasaan politik dan ekonomi suatu negara. Selain itu, ibu kota mencerminkan aspek kebudayaan dari negara tersebut, yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda dan unik dari negara terkait. Kota dibangun sebagai

bukti diri berdasarkan suatu negara untuk membantu negara terkait menjadi makmur. Negara dianggap maju dan berkembang jika pengelolaan dan pembangunannya sempurna dan tidak berdampak negatif pada siapa pun. Pengelolaan ibukota adalah tugas yang sulit karena membutuhkan pertimbangan yang matang untuk menghindari perselisihan. Pemerintah negara harus mempertimbangkan semua efek yang tidak akan membahayakan negara lain saat pemindahan ibu kota.

Sebab dinamika penduduk di Jakarta akan terus berkembang ketika pemerintah berinteraksi dengan kekuatan ekonomi. Terutama pada transportasi publik yang harus direvitalisasi agar sistem transportasi publik dapat jangka panjang dan ekonomis, salah satunya adalah sebuah program, yaitu Jaklingko. Jaklingko bertujuan untuk menyediakan sistem transportasi publik yang lebih efisien dan terkoordinasi dengan harapan dapat meningkatkan kenyamanan Masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggapi masalah yang mendesak bagi kehidupan kota Jakarta.



Gambar 1. 1 Moda Transportasi Terintegrasi

Jaklingko merupakan salah satu transportasi publik yang mendukung sistem transportasi terintegrasi di Jakarta yang memfasilitasi warga untuk melakukan mobilitas internal di dalam kota karena memiliki dua bentuk armada, yaitu armada besar dan armada kecil. Tetapi untuk revolusi angkutan umum sebagian masih sama seperti angkot konvensional. Namun, hanya sedikit yang berbeda secara signifikan dalam melakukan sistem pembayaran melalui kartu uang elektronik dan

infrastruktur yang lebih nyaman (Al-Adha & Atmojo, 2023). Dan pengemudinya pun tidak ugal-ugalan pada saat mengendarai.

Jaklingko ini dilaksanakan tanggal 15 Juli 2020 (Forino & Putranto, 2023). Walaupun program ini belum 100% penerapannya, namun pemerintah berencana segera menerapkannya di seluruh tempat umum secara bertahap mulai dari MRT, LRT, TransJakarta, Mikrotrans Jaklingko. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2021 terkait Peraturan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi Yang Menyeluruh Terintegrasi (Peraturan Gubernur, 2021). Yang berisikan pada perencanaan Pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi di Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta yang dikenal sebagai rencana induk transportasi Jakarta. Penyelenggaraan ini dinamakan sistem Jaklingko yang mendukung kebijakan pada peningkatan penggunaan angkutan massal dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi berupa mobil dan motor. Selain itu, interoperabilitas merujuk pada kapabilitas data untuk dipakai pada saat menggunakan yang sesama sistem elektronik.

Peraturan ini di rancang oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang timbul dengan adanya urbanisasi dan mengurangi kemacetan lalu lintas yang menjadi masalah utama di kota-kota besar serta meningkatkan konektivitas. Dengan cara menyediakan transportasi publik secara luas agar mampu mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari konektivitas tersebut. Maka munculnya transportasi yang terintegrasi. Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari *Smart City*.

Smart city adalah Salah satu strategi pengembangan kota yang menarik dalam mengatasi berbagai masalah perkotaan adalah melalui penerapan konsep kota cerdas, juga dikenal sebagai kota pintar. Kota cerdas adalah upaya kreatif yang dilakukan oleh ekosistem perkotaan untuk menghadapi beragam masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta komunitas setempat. Dalam merencanakan dan pengembangan perkotaan yang cerdas melibatkan teknologi ke dalam struktu infrastruktur, dengan penerapan inovatif untuk mengelola dan mengkoordinasikan operasional kota di masa depan.

Tujuannya untuk merencanakan dan pengembangan distrik perkotaan yang cerdas melibatkan teknologi ke dalam struktu infrastruktur, dengan penerapan inovatif untuk mengelola dan mengkoordinasikan operasional kota. Kota pintar menggunakan model berkelanjutan untuk administrasi, infrastruktur, dan pembangunan untuk mengendalikan arus urbanisasi dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan untuk memperkuat keterkaitan antara kota dan desa maupun wilayah sekitarnya. Ini juga secara tidak langsung mempengaruhi Pembangunan.

Terdapat enam bagian untuk mewujudkan smart city menurut Diagram Cohen, yaitu: 1. Smart government terkait dengan keterbukaan dan kemudahan akses data pemerintah oleh masyarakat, ketersediaan layanan internet (wi-fi), serta potensi sumber daya manusia di wilayah perkotaan. 2. Smart people/ society, yang terkait dengan aspek Pendidikan dan integrasi masyarakat. 3. Smart economy melibatkan kegiatan internasional, proyek pembangunan dan penelitian, serta perkembangan bisnis startup.

4. Smart living, terkait dengan lingkungan hidup yang sehat, keamanan masyarakat, perlindungan kebahagiaan, dan evaluasi distribusi pendapatan. 5. Smart mobility, terkait dengan sistem transportasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, seharusnya menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan, mendorong penggunaan transportasi umum, dan menjamin keakuratan akses transportasi sesuai waktu. 6. Smart environment, aspek ini terkait dengan jumlah taman per individu, jejak karbon, dan pengelolaan limbah sampah yang cerdas.

Maka dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini, maka munculnya kontribusi pada transportasi publik terintegrasi yang mampu mengurangi emisi karbon dan polusi udara. Kontribusi ini sangat efisien dan ramah lingkungan, seperti bus listrik atau kereta api yang beroperasi pada energi terbarukan, dapat menggantikan kendaraan bermotor yang beroperasi dengan bahan bakar fosil. Ini berkontribusi pada udara yang lebih bersih dan lingkungan hidup yang lebih sehat bagi penduduk kota.

Transportasi publik terintegrasi juga meningkatkan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dengan

menyediakan layanan yang terjangkau dan dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, sistem ini memungkinkan akses yang lebih luas ke peluang pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan sosial. Sehingga dari hal itulah yang membuat pemerintah melakukan kolaborasi dengan seluruh angkutan umum di Jakarta.

Namun, masih banyak masyarakat dan sopir angkot konvensional yang tidak merespon positif dengan keberadaan Jaklingko. Tetapi pemerintah DKI selalu berusaha untuk mengatasi permasalahan ini dengan bersosialisasi dengan Masyarakat agar mengetahui bahwa transportasi di Jakarta sudah menggunakan kartu uang elektronik bukan uang tunai yang biasa dilakukan. Sistem ini melibatkan dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan pemerintah dan pengusaha angkot konvensional untuk menjadi bagian dari pembangunan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sebab dengan keberadaan Jaklingko dianggap mengancam kelangsungan bisnis mereka.

Yang mengakibatkan konflik antar sopir Transjakarta dan angkot konvensional pada tanggal 10 Mei 2023 di Stasiun Tebet. Pada akhirnya pemerintah melakukan kesepakatan kepada angkot konvensional untuk tetap beroperasi di jalur tersebut. Dan pemerintah juga akan memperluas rute-rute pelayanan Jaklingko secara bertahap di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan edukasi atau sosialisasi kepada sopir transportasi publik bahwa angkutan mereka tetap beroperasi di jalur tersebut dan melakukan pengarahan supaya para sopir angko konvensional dapat pindah ke sopir Jaklingko. Supaya seluruh sopir transportasi publik dapat mengikuti peraturan dalam berkendara yang aman, teratur, lancar dan terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang serius, mengembangkan wilayah, meningkatkan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjunjung tinggi martabat bangsa.

Menurut UU Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, mengenai peran penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem transportasi publik mencakup kelancaran lalu lintas dan Pengangkutan yang melibatkan kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan.

Keberadaan UUAJ untuk melakukan edukasi atau sosialisasi kepada supir transportasi publik tentang cara berkendara yang aman, teratur, lancar dan terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan wilayah, meningkatkan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjunjung tinggi martabat bangsa. (Kurniawijaya, 2021). Karena diperlukan Pembangunan yang seriusan dan berkelanjutan, sebab apabila pembangunan transportasi yang baik pasti akan memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Stasiun Tebet merupakan salah satu kawasan yang memiliki akomodasi transportasi publik yang sebagian besar sudah bergabung dengan Jaklingko. Kawasan ini dianggap sangat strategis untuk para pekerja. Pemerintah sudah menerapkan sistem kartu uang elektronik dalam melakukan penataan moda transportasi publik saat ini. Kartu tersebut mudah didapat di berbagai tempat sarana transportasi publik dan beberapa bank lain. Sehingga perubahan sosial inilah yang membuat Stasiun Tebet akan semakin meningkat.

Namun, keberadaan Jaklingko sebagai Kerjasama antara pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat yang mempunyai usaha pengangkutan. Tujuannya adalah untuk mendorong integrasi dalam pengembangan angkutan umum baik secara fisik maupun dari segi harga dan pelayanan. Namun untuk saat ini, keberadaan angkutan konvensional masih diperbolehkan. Di sisi lain, kehadiran Jaklingko dianggap sebagai ancaman pada keberlangsungan transportasi perkotaan. Pasalnya, angkot konvensional telah memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta hingga saat ini.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan transportasi publik terintegrasi di DKI Jakarta. Pertanyaan inilah yang menjadi inti penelitian, antara lain:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Dalam Membangun Sistem Transportasi Publik Yang Berkelanjutan?

2. Bagaimana Respon Pengguna Terhadap Kebijakan Transportasi Publik Terintegrasi?
3. Bagaimana Keberlanjutan Angkot Konvensional Dengan Adanya Transportasi Publik Khususnya Jaklingko?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka terdapat tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Dalam Membangun Sistem Transportasi Publik Yang Berkelanjutan
2. Mengetahui Respon Pengguna Terhadap Kebijakan Transportasi Publik Terintegrasi.
3. Mendeskripsikan Dan Menganalisis Terhadap Keberlanjutan Angkot Konvensional Dengan Adanya Transportasi Publik Khususnya Jaklingko.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulis dari penelitian yang ingin penulis peroleh adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi masyarakat untuk memahami strategi transportasi publik di Jakarta pada masa yang akan datang.
2. Kegunaan praktisi
 - a. Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai dampak transportasi perkotaan, perencanaan dan keberlanjutan kota.
 - b. Pembaca dan peneliti berikutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan peneliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini, dalam penyusunan skripsi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang isi dari sebuah pembahasan skripsi. Berikut penjelasan mengenai sistematika penulisan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan sebagai bab awal terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka dibagi menjadi beberapa bagian sub bagian yang mencakup penelitian terdahulu yang relevan, teori dan konsep yang digunakan peneliti. Kemudian kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian mengacu pada pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas mengenai rumusan masalah yang sudah ditentukan sehingga dapat memberikan jawab bagi penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasari oleh pembahasan yang sudah dijelaskan pada BAB IV.